

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu

Sri Indarti^{1*}, Reni Insiroh², Titi Darmi³

^{1,2,3}Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Bengkulu
*sriindarti@umb.ac.id

Abstract: The problem raised in this research is the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in dealing with flood disasters in Bengkulu City, especially Rawa Makmur Village, Bengkulu City. The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in dealing with flood disasters in Bengkulu City, especially Rawa Makmur Village, Bengkulu City. Researchers used descriptive methods with a qualitative approach in this research. With research focus, there is 1, namely the role of the Disaster Management Agency (BPBD) in managing the flood disaster in Bengkulu City (Study of Rawa Makmur Village, Bengkulu City). The data collection techniques used in this research are observation, interviews and documentation, while the data analysis technique uses three steps to analyze data, namely: data reduction and presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the role of the BPBD of Bengkulu City in managing flood disasters in the Rawa Makmur sub-district of Bengkulu City has not gone well, even though the role of BPBD of Bengkulu City is in implementing the principles of good disaster management, namely that disaster management is carried out quickly and precisely in accordance with the demands of the situation. However, it can be seen from the efforts to handle disasters that have occurred that they have been implemented but have not been realized and have not run optimally. This can be seen based on policy determination, disaster prevention, emergency response, disaster rehabilitation and reconstruction that have not been maximized.

Keywords: Disaster management; Flood; Role of BPBD.

Abstrak : Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Bengkulu khususnya Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Bengkulu khususnya Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini. Dengan focus penelitian ada 1 yaitu Peranan Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Kota Bengkulu (Studi Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dengan tiga langkah untuk menganalisis data yaitu: reduksi data dan penyajian serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran BPBD kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu yakni belum berjalan dengan baik walaupun peranan BPBD kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Akan tetapi terlihat dari upaya penanganan bencana yang terjadi sudah di laksanakan tetapi belum terealisasi dan belum berjalan dengan maksimal. hal itu terlihat

berdasarkan penetapan kebijakan, pencegahna bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekontruksi bencana belum maksimal

Kata Kunci : Banjir; Peran BPBD; Penanggulangan Bencana.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang secara geografis terletak di daerah khatulistiwa, terutama terletak di antara Benua Asia dan Australia serta di apit oleh dua Samudra yakni Samudera Pasifik dan Hindia, dan juga berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia yang merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana alam. Sebagai daerah rawan bencana, pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi terjadinya bencana sebelum atau setelah terjadinya bencana yakni dengan melakukan mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi.

Dalam hal ini Indonesia yang sadar akan posisinya sebagai negara bencana, maka pemerintah membentuk sebuah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal menanggulangi bencana, BNPB pun dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB merupakan realisasi Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah membentuk Badan Nasional Penaggulangan Bencana.

Bencana merupakan salah satu fenomena alam yang tidak dapat dihilangkan sama sekali, tetapi dapat dihilangkan dikurangi dengan mengurangi dampak kerusakannya terhadap masyarakat dan lingkungan. (Indarti et al., 2017) Bencana terjadi apabila komunitas mempunyai tingkat kemampuan yang lebih rendah dibanding dengan tingkat ancaman yang mungkin terjadi. Ancaman menjadi bencana apabila komunitas rentan, atau memiliki kapasitas lebih rendah dari tingkat bahaya tersebut, atau bahkan menjadi salah satu sumber ancaman. Tentu sebaiknya tidak dipisah-pisahkan keberadaannya, sehingga upaya-upaya peredaman risiko itu dilakukan. Bencana terjadi apabila masyarakat dan sistem sosial yang lebih tinggi tidak mempunyai kapasitas untuk mengelola ancaman yang terjadi padanya (Indarti, S. dkk. 2017). Artinya, dibutuhkan kapasitas

Sumber Daya Manusia yang memadai dalam melaksanakan peran (Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. 2017).

Penanggulangan bencana merupakan suatu proses yang dinamis, yang dikembangkan dari fungsi manajemen klasik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pembagian tugas, pengendalian dan pengawasan dalam penanggulangan bencana. Proses tersebut juga melibatkan berbagai macam organisasi yang harus bekerjasama untuk melakukan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan akibat bencana (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2017). Kesiapsiagaan dibutuhkan budaya organisasi yang konsisten agar peran organisasi dapat terlaksana (Darmi, Titi., & Iprianto. 2013).

Adapun penanggulangan bencana merupakan bentuk integral pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional, artinya suatu rangkaian kegiatan penanggulangan bencana yang terbagi menjadi tiga tahap yakni sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Dalam hal ini terkadang bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (emergency response). Kurangnya kebijakan pemerintah yang integral dan kurangnya koordinasi antar elemen dianggap sebagai beberapa penyebab yang memungkinkan hal itu dapat terjadi.

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang badan penanggulangan bencana dalam pasal 18 di dalam Undang–Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kotamadya. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu. Dalam pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bengkulu tersebut menyebutkan bahwa dengan peraturan daerah ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan masyarakat di bidang penanggulangan bencana daerah (Pratama, 2017)

Salah satu bencana yang sering terjadi di kota Bengkulu salah satunya yakni masalah banjir. Banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering

(bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (*run off*) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang di atas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain (Andhini, 2017).

Permasalahan mengenai bencana banjir sering juga terjadi di wilayah kota Bengkulu. Seperti yang telah diberitakan melalui (www.metrotvnews.co.id) bahwa pada tahun 2015 silam telah terjadi bencana banjir yang merendam 200 rumah warga Kota Bengkulu. Air merendam rumah warga sudah setinggi satu meter akibat hujan deras masih terjadi dan untuk minum warga harus menggunakan air kemasan karena sumur ikut terendam. Hal semacam ini terjadi karena sungai 5 Bengkulu meluap dengan deras karena pintu air tidak berfungsi sehingga tidak dapat membendunginya masuknya air sungai akibat hujan deras. Ketika berbicara mengenai berita yang disampaikan oleh media tersebut maka dapat dianalisis bahwa dalam penanganan yang dilakukan oleh tim BPBD kota Bengkulu belum sepenuhnya optimal terbukti dengan adanya permasalahan pintu air yang tidak berfungsi sehingga air sungai meluap mengakibatkan ratusan rumah warga Kota Bengkulu terendam, dan juga dalam berita melalui (bengkulu.tribunnews.com) oleh Hendrik Budiman menyebutkan sebagian masyarakat yang terdampak di Kawasan rawa Makmur mengalami banyak kerugian dan ditambah lagi meningkatnya pembangunan ruko di sekitaran dekat rumah warga serta mengeluhkan banjir di Kawasan rawa Makmur tidak pernah usai usai.

Kemudian permasalahan lainnya seperti yang di beritakan oleh [Tribunbengkulu.com \(tribunnews.com\)](http://Tribunbengkulu.com) yakni dari pintu air di kawasan kelurahan tanjong agung usai banjir terdapat temuan sampah di pintu air (jiafni rismawani, 2022) serta, dalam hal ini dapat di lihat bahwa upaya pemerintah dan juga dinas terkait dan juga BPBD dalam menanggulangi bencana belum bisa

berkoordinasi dengan baik. Selain itu temuan lainnya pintu air di kawasan tanjung agung berfungsi akan tetapi belum bisa dapat di katakan berfungsi secara maksimal karna Ketika masalah bencana bisa kapan saja dan tiba tiba debit air yang sangat tinggi datang sehingga luapan air yang sangat besar tidak dapat terbendung sehinggga sama saja membuat genangan air di sekitar dan menyebabkan banjir di sekitar kawasan.

Dari permasalahan tersebut dapat di lihat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan bencana banjir yang di lakukan oleh BPBD kota Bengkulu masih dapat belum di katakana maksimal padahal tugas dan fungsi BPBD dalam menanggulnagani bencana harus searah dengan tugas BPBD dalam menanggulangani masalah bencana yakni tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat, pasca bencana serta juga BPBD Kota Bengkulu mempunyai tiga tugas utama dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai pelaksana, komando dan koordinasi. Serta peran BPDB dalam menanggulangani bencana banjir dapat tergolong siap saat kejadian bencana akan tetapi pasca setelah banjir masyarakat mengeluhkan tidak ada bantuan terhadap masyarkat paca banjir dan masyarkat yang mengeluhkan dokumen yang rusak akibat banjir, selain itu peran BPBD dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal melakukan upaya penganangan bencana banjir Kawasan rawa mamur di anggap kurang seperti melakukan upaya normalissi sungai, pembuatan drainase di sekitaran bantaran sungai untuk mencegah meluapnya air agar mencegah banjir di Kawasan tersebut.

Untuk menciptakan masyarakat Provinsi Bengkulu menjadi masyarakat yang kesiapsiagaan maka perlu adanya kesinambungan antar instansi baik itu pemerintah maupun instansi non pemerintah. Karena koordinasi setiap instansi itu sangat penting untuk meciptakan manajemen yang baik dalam melaksanakan kebijakan mitigasi bencana. Ini bukan hanya tugas BPBD semata tapi ini juga tugas setiap instansi yang ada di Provinsi Bengkulu baik itu pemerintah, LSM dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan Provinsi Bengkulu menjadi masyarakat yang siap siaga bencana (Sakti et al., 2020)

BPBD Kota Bengkulu mempunyai fungsi strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Bengkulu. Penyelenggaraan Penanggulangan bencana dilakukan secara teintegrasi pada tiga tahapan bencana, yaitu pra, saat,

dan pascabencana. Oleh sebab itu, BPBD Kota Bengkulu mempunyai tiga tugas utama dalam penanggulangan bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi urusan bersama antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) masyarakat dan Lembaga usaha. Sesuai dengan amanat Pemerintah Kota Bengkulu menindaklanjuti amanat tersebut dengan membentuk BPBD Kota Bengkulu melalui Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bengkulu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Bengkulu (Studi Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu)”. Dengan adanya permasalahan yang muncul tersebut sehingga dapat muncul solusi yang dapat di tawarkan untuk pemerintah dan juga pihak BPBD dalam menanggulangi bencana banjir yang ada di kota Bengkulu khususnya di kelurahan rawa Makmur kota Bengkulu.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi atau fenomena yang ada pada objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber Informasi mengenai hal ini dapat dilihat dari;

1. Data Primer
2. Data Sekunder.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut sugiono, (2015) maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu *data display*, *data reduction*, dan *data verification* (Ari, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis kelurahan rawa Makmur terletak di antara 20' 5' LS dan 101" 104' BT. Kelurahan rawa Makmur berada di sebelah utara kota Bengkulu dengan luas wilayah kurang lebih 150 Ha. Kelurahan rawa Makmur Sebagian

besar merupakan daratan rendah yang subur serta beberapa tempat terdapat daerah yang bergelombang. Wilayah kelurahan rawa Makmur berbatasan dengan wilayah-wilayah Sebelah utara yakni Kel. Rawa Makmur Permai, Sebelah selatan yakni Kel. Tanjung Agung, Sebelah timur yakni Kel. Pematang Gubernur, Sebelah Barat yakni Kel. Rawa Makmur Permai

Sejarah Terbentuknya BPBD Kota Bengkulu

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) , merupakan implementasi Pasal 5, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Perjalanan operasional BPBD Kota Bengkulu diawali dengan menempati gedung BPBD Hibah Dinas Sosial Propinsi Bengkulu yang berlokasi di Jl. Re. Martadinata IV Kel. Pagar Dewa Kota Bengkulu. Seiring dengan berjalannya waktu dan mempertimbangkan langkah strategis untuk lebih mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Bengkulu terutama dalam rangka mendukung operasional dan peningkatan kinerja penyelenggaraan penanggulangan bencana. Adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana perkantoran dan pendukung penting lainnya dalam penanggulangan bencana. Melalui upaya implementasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana, terutama yang didukung melalui kegiatan Rehabilitasi Kantor dan Gudang BPBD Kota Bengkulu, maka dengan penuh rasa syukur dan bangga, bahwa dengan usaha keras Pemerintah Kota Bengkulu telah mengupayakan merealisasikan penyediaan kantor dan Gudang BPBD Kota Bengkulu.

Berdasarkan perda BPBD di bentuk berdasarkan Undang-Undang No 03 Tahun 2010 tentang BPBD Kota Bengkulu. Yang di amanatkan berdasarkan Perda pemerintah Kota Bengkulu No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kemudian Undang-Undang No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Permendagri Nomor 46 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja BPBD sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD kota Bengkulu, maka BPBD kota Bengkulu mempunyai peran yakni :

Penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana

Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada BPBD, terdiri dari aspek-aspek penetapan satgas bencana, koordinasi dengan OPD terkait, dan pengalokasian anggaran bencana. Diantara realisasi penetapan kebijakan ini, salah satu sumber informasi menyatakan bahwa :

“..kalau untuk pedoman penetapan kebijakan penanggulangan bencana, berdasarkan dari data atau dasar, BPBD itu merupakan Lembaga yang berada di daerah yang bertujuan untuk melaksanakan penanggulangan bencana di daerah sesuai yang diamanat dari Undang-Undang 24 tahun 2007, Dasar yang di lakukan turunan dari Undang-Undang itu tersebut, kemudian diamanatkan dalam Peraturan Walikota No 02 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Bencana. Penanganan bencana di daerah khususnya di kota, fungsi dan tugas BPBD itu sendiri berpedoman pada Undang-Undang No 03 tahun 2010..” (*Sumber : wawancara 20 februari 2023*)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedoman penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang di dasarkan pada tiga acuan peraturan/ regulasi yang ditetapkan yakni Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, Peraturan Walikota No 02 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Undang-Undang No 03 tahun 2010 tentang BPBD Kota Bengkulu.

Pernyataan penetapan kebijakan di tuturkan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistic, terkait dengan Penetapan Satgas Bencana yakni sebagai berikut :

“..Saat terjadi bencana yang di lakukan BPBD yakni dengan menetapkan satgas yang di kenal dengan TRC yang berperan dalam melakukan peninjauan ke lapangan dengan mengidentifikasi lokasi lokasi yang rawan banjir atau terdampak banjir dan melakukan pengkajian informasi bencana seperti korban bencana, kerusakan pelayanan umum dan rumah warga dll. kemudian menginformasikan ke kantor apa yang di perlukan saat terjadi bencana yakni peralatan dan bantuan dll serta untuk di jadi kebijakan apa yang harus di lakukan BPBD saat terjadi bencana..” (*Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023*)

Peneliti juga melanjutkan wawancara pada informan terkait dengan topik peneliti yaitu peran BPBD Kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa Makmur Kota Bengkulu terkait aspek dari penetapkn kebijakan yakni koordinasi dengan pihak terkait (OPD) di ungkapkan oleh kepala

bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bapak, Firmanto, ST yang di temui di BPBD kota Bengkulu Pada tanggal 20 Februari 2023 yakni sebagai berikut :

“..Berdasarkan Analisa di kota Bengkulu banjir merupakan ancaman yang tinggi selain gempa bumi dan tsunami, hal yang telah di lakukan BPBD dalam penanggulangan bencana dalam mitigasi bencana secara strukturalnya yaitu melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan pemda di karenakan BPBD merupakan komando dalam penanggulangan bencana dengan memasang penahan tembok tembok di sekitaran sungai Bengkulu yang bertujuan untuk air tidak memperluas/ancaman paparan daerah sekitar kemudian BPBD berkerja sama dengan kementrian dengan melakukan pengerukan di hulu sungai dan atas usulan BPBD untuk penanganan banjir itu dibuat wung yang lokasinya ada di 2 yakni daerah tanjung agung dan sawah lebar baru. BPBD berkoordinasi dengan kementrian balai sungai, pemda kota Bengkulu dan dinas PUPR Kota..” (Sumber : wawancara pada tanggal 20 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pada saat pra bencana dalam penanggulangan bencana kementrian balai sungai, pemda kota Bengkulu, dinas PUPR kota Bengkulu. Sedangkan saat terjadi bencana BPBD bekerja sama dengan Basarnas, TNI/POLRI, masyarakat. Kemudian saat pasca bencana BPBD berkoordinasi dengan dinas Kesehatan, dinas sosial, dinas PUPR. Kemudian di ungkapkan oleh kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bapak Firmanto, ST yang di temui di BPBD kota Bengkulu Pada tanggal 20 Februari 2023 yakni sebagai berikut :

“..Berdasarkan aturan yang sudah di tetapkan anggaran bencana yang terdampak banjir biasayan di sudah di tetapkan dari pusat atau BNPB biasanya dana itu disebut dana ongkol atau dana tak terbatas, dana itu akan keluar ketika BNPB sudah menetapkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah yang membutuhkan bantuan dan anggaran itu akan di bagikan ke masing masing OPD yang bertindak nanti, ke kelurahan atau ke kecamatan biasanya anggaran yang di berikan dari pihak BPBD sama..” (Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023)

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penetapan anggaran dalam penanggulangan bencana banjir, anggaran dana akan di keluarkan dari pusat berdasarkan survei atau usulan dari BPBD kota Bengkulu, khususnya di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu dana anggaran yang kucurkan hanya untuk bencana terjadi bukan pasca bencana.

Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Wawancara dengan kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, terkait upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu sebagai berikut :

“..Rawa Makmur itu merupakan daerah paparan yang rawan banjir karna dia berhubungan langsung dengan sungai bengkulu, yang kita lakukan kita hanya mengusulkan secara mitigasi pengurangan resiko bencana pengusulan ke dinas PUPR untuk perbaikan saluran drainase di sekitaran kelurahan kemudian kita mengusulkan ke kementrian salah satunya yaitu pendirian tanggul tanggul sungai bengkulu dan normalisasi sungai2 muara bangkahulu bengkulu yang di akibatkan karna pendangkalan, maksudnya biar banjir tidak masuk langsung ke perumahan masyarakat dan itu dananya besar dan kita hanya sekedar memberikan usulan ke pemda kota, kementrian provinsi, kemudian dan itu secara struktrual dan secara non strukturala kita adakan sosialisasi ke masyarakat dan tiap tiap kelurahan kita harapkan adanya gotong royong, menghimbau jangan mendirikan bangunan di saluran, jangan mengotori saluran, jangan menutup saluran dan itu yang kita sudah lakukan..” (*Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023*)

Berdasarkan pernyataan di atas, upaya yang di lakukan BPBD kota bengkulu dalam mencegah dan menanggulangi banjir di kelurahan rawa makmur yakni secara strukturalnya mengusulkan ke kementrian balai sungai untuk menormalisasikan sungai dan pendirian tanggul/ tembok tembok pembatas yang di akibatkan karna pendangkalan sungai dan pembuatan kolam retensi (Mbung) di sungai muarabangkahulu, melakukan perbaikan saluran drainase dan kebersihan saluran drainase, kemudian non struktrulanya yakni melakukan sosialisasi tentang pencegahan dan penanggulangan bencana kepada masyarakat yang daerahnya rawan benacana banjir dan memberikan himbauan ke masyarakat untuk tanggap, sigap, dan siaga dengan segera mengungsi jika terjadi bencana atau tetap tenang dalam menghadapi bencana banjir.

Kemudian wawancara dengan ketua lurah rawa makmur, terkait upaya pencegahan BPBD kota bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota bengkulu sebagai berikut :

“..Untuk upaya pencegahan yang di lakukan BPBD seperti yang disebutkan tadi untuk di kelurahan rawa makmur belum ada,, paling kita dari pihak lurah menghimbau dan memonitoring kepada masyarakat untuk bersiap ketika banjir itu akan datang, kalau air sudah naik, siap siaplah gitu” (*Sumber : wawancara pada 20 februari 2023*).

Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan, kesimpulannya bahwa upaya pencegahan yang di lakukan pemerintah/BPBD kota bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota bengkulu belum berjalan dengan baik, hal itu berdasarkan keterangan dari ketua lurah, warga dan tokoh masyarakat yang terdampak banjir dari keterangan.

Kedaruratan dan Logistik

Sebagaimana yang di ungkapkan oleh kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD kota Bengkulu, sebagai berikut :

“..Ketika terjadi bencana banjir di kota upaya yang di lakukan BPBD dalam penanganan bencana yang kita lakukan pertama kali yakni melakukan evakuasi terhadap korban korban yang terjebak banjir dengan berkoordinasi dengan pihak lain seperti basarnas untuk evakuasi/pencarian untuk pengamananan yakni Polri/TNI dan masyarakat, karna masyarakat merupakan orang terdampak banjir. Kemudian kita sekiranya banjir itu sudah parah dan merendam rumah warga kami akan bikin titik kumpul untuk pengungsian untuk warga. Untuk kelurahan rawa makmur ketika terjadi banjir kita sudah melakukan evakuasi untuk warga, standby perahu karet dan peralatan lainnya. Kemudian kita bikin posko, mendirikan tenda untuk mengungsi warga sana, kita suplay kebutuhan logistic berupa pangan, papan sama sandang dengan berkoordinasi dengan pihak juga seperti dari dinas sosial, dan dari pihak lainnya, Kemudian nanti kita salurkan ke kecamatan muarabangkahulu kemudian di salurkan kelurahan rawa makmur..” (Sumber : wawancara pada 20 Februari 2023)

Berdasarkan dari pernyataan di atas dapat di jelaskan bahwa saat terjadi bencana bidang kedaruratan dan logistic, terkait penanggulangan bencana banjir di kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu BPBD sudah melakukan upaya evakuasi atau kegiatan penyelamatan bagi warga yang terjebak/terdampak banjir, BPBD kota sudah standby dengan menyiapkan peralatan seperti perahu karet dll, kemudian membuat posko bencana/mendirikan tenda untuk warga mengungsi dan menyuplai dan menyalurkan kebutuhan logistic berupa pangan ke kelurahan rawa makmur. Selain itu tentunya dalam penanggulangan bencana banjir BPBD tentu tidak melakukan tugasnya sendiri, ia berkoordinasi dengan pihak/ dinas terkait.

Adapun wawancara dengan ketua lurah rawa makmur, bapak Desmiarman, SIP yang di temui di kantornya pada 20 Februari 2023 terkait kedaruratan dan logistic dalam upaya penanggulangan bencana banjir ketika terjadi banjir di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu sebagai berikut :

“..Untuk daerah rawa makmur evakuasi warga untuk tahun belakang dan tahun ini, untuk daerah rawa makmur belum ada, tapi mungkin untuk kelurahan lain ada, kalau banjirnya parah untuk posko biasanya kita buat posko sendiri tentunya berkoordinasi dengan pihak RT, kita menumpang tempat usaha masyarakat, kebetulan ada tempat lesehan dan kebetulan kalau banjir airnya juga nggak naik masuk ke sana. Jadi warga malah mengungsi ke sana. Dan BPBD dan dinas sosial buka dapur umum. Untuk penyaluran kebutuhan logistic ada berupa sembako untuk masyarakat yang

di pengungsian. Biasanya BPBD itu standbeye untuk lokasi yang paling parah di kota Bengkulu misalnya di Tanjung Agung sama di Kelurahan Semarang..” (Sumber :wawancara pada 20 Februari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dari informan terkait seperti Kepada bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kota Bengkulu terkait upaya tanggap darurat dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu seperti melakukan evakuasi terhadap korban banjir dengan menyiapkan perahu karet dll serta mendirikan posko untuk warga yang terdampak banjir dan membuka dapur umum serta memberikan bantuan logistic berupa sembako, tentunya BPBD, berkoordinasi dengan pihak terkait seperti dinas sosial, kementrian, basarnas, TNI/POLRI. Akan tetapi hasil temuan di lapangan upaya yang di lakukan tersebut ketika terjadi banjir khususnya di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu, berdasarkan keterangan dari kepala lurah, tokoh masyarakat dan warga yang terdampak paling parah banjir di Kelurahan Rawa Makmur belum berjalan baik, dalam upaya evakuasi, membantu masyarakat yang di lakukan BPBD kota belum ada walaupun daerah Rawa Makmur intensitas tingkat keparahannya tidak begitu buruk jika di bandingkan dengan daerah lainnya yang ada di kota Bengkulu,

Rehabilitasi dan rekontruksi

Berdasarkan keterangan dari kepala bidang rekontruksi dan rehabilitasi, berdasarkan analisis BPBD kota Bengkulu banjir di kota Bengkulu upaya yang di lakukan dalam rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana banjir dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu yakni seperti pemulihan, perbaikan dan pembangunan saran dan prasarana dan bangunan rumah warga di kota Bengkulu belum di laksanakan karna banjir di kota Bengkulu sifatnya hanya merendam serta juga berkoordinasi dalam melakukan pemeriksaan Kesehatan pasca bencana yang di lakukan puskesmas setempat dan dinas Kesehatan dalam upaya rehabilitasi/ pemulihan kesehatan masyarakat yang di akibatkan pasca bencana.

Wawancara dengan kepala lurah Rawa Makmur Kota Bengkulu yang di wawancarai di kantornya pada 20 Februari 2023 terkait upaya rekontruksi dan rehabilitasi yang di lakukan BPBD kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu sebagai berikut :

“Pasca banjir kita sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari puskesmas, biasanya membuka pelayan Kesehatan untuk warga yang terdampak banjir khususnya untuk warga. Kalau untuk upaya pemulihan, pembangunan perbaikan sarana dan prasarana di kelurahan ini belum ada, alhamdulillah belum ada rumah warga yang rusak parah tapi mungkin di kelurahan lainnya ada. Saran dan prasarana seperti terganggunya kegiatan lalu lintas masyarakat yang diakibatkan oleh banjir seperti terputusnya hubungan jalan Kalimantan ke kejalan lintas barat Sumatra paling parah itu pernah merendam jalan sampai 1.5 meter yang menanggu lalu lintas. Tapi untuk pembangunan rumah warga belum sampai rusak parah. Dan sebenarnya kalau ada banjir itu kasian sama masyarakatnya, tapi mau gimana sebenarnya mereka juga salah, kasarnya gini itu daerah bantaran sungai yang tidak boleh di bikin tempat tinggal, kenapa mau tinggal di sana sebenarnya pihak pemerintah sudah menghimbau untuk tidak tinggal di daerah sana, sudah dapat pengantian, uang di terima tapi masih balik lagi mau tinggal di sana ketika terjadi banjir besar masyarakat yang kesusahan juga jadi mau salahkan siapa..” (*Sumber :wawancara pada 20 februari 2023*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menyatakan bahwa dalam upaya rekonstruksi dan rehabilitasi dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu belum berjalan atau belum terealisasi karena berdasarkan keterangan dari kepala bidang rekonstruksi dan rehabilitasi bahwa upaya ini belum berjalan mengingat dampak pasca bencana yang dihasilkan dari bencana banjir belum berada di tahap menghancurkan. Untuk kota Bengkulu upaya dalam bidang rehabilitasi dan rekonstruksi upaya ini akan berjalan jika dilihat dari tingkat keparahan yang terjadi di lapangan saat terjadi bencana apakah dampak dari pasca bencana sarana dan prasarana dan bangunan warga yang terkena banjir penanggulangan bencana banjir.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Peran BPBD kota Bengkulu dalam penanggulangan bencana banjir di kelurahan rawa makmur kota Bengkulu yakni belum berjalan dengan baik walaupun peranan BPBD kota Bengkulu dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Akan tetapi terlihat dari upaya penanganan bencana yang terjadi sudah dilaksanakan tetapi belum terealisasi dan belum berjalan dengan maksimal hal itu terlihat dari keterangan kepala lurah dan warganya upaya penanggulangan bencana yang dilakukan di

BPBD khusus di kelurahan rawa makmur belum di laksanakan dan terealisasi. Dalam hal ini dapat di jelaskan berdasarkan :

1. Penetapan kebijakan

Tanggung jawab pemerintah dalam menetapkan kebijakan terhadap penanggulangan bencana banjir di Kelurahan Lewaja Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. Pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan mengambil sikap dan tindakan yang memberikan pelayanan ketika terjadi bencana, mendirikan posko tanggap darurat, dapur umum dan kebutuhan masyarakat lainnya.

2. Pencegahan dan tanggap darurat bencana

Pelaksanaan pencegahan bencana atau meminimalisir terjadinya bencana banjir berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul,antisipasi yang dilakukan pemerintah Daerah seperti menghimbau/melarang masyarakat untk tidak melakukan aktivitas batu bara di sekitar sungai muarabangkahulu, melakukan perbaikan saluran drainase, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebencanaan, menormalisasikan sungai, mengusulkan pendirian tanggul/tembok pembatas di sekitar sungai muarabangkahulu dan pembuatan kolam retesi/DAM.

3. Kedaruatan dan logistic

Pelaksanaan tanggap darurat yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan seperti pengurusan pengungsian, penyelamatan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat Kelurahan Rawa Makmur yang terdampak bencana banjir.

4. Rekontruksi dan rehabilitasi

Pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi pada masyarakat yang terdampak bencana banjir, yaitu pemulihan / pembangunan sarana dan prasarana dan rumah warga yang terdampak banjir. Di kelurahan rawa makmur upaya rekonstruksi dan rehabilitasi belum terlaksana di akreanakan banjir belum sepenuhnya merusak bangunan dan sarana prasarana. Adapun juga

upaya rekonstruksi dan rehabilitasi yakni mengusulkan pendirian tanggul/tembok pembatas di sekitar sungai muarabangkahulu dan pembuatan kolam retensi/DAM sepanjang sungai akan tetapi membutuhkan dana yang besar sehingga rehabilitasi dan rekontruksi di Kelurahan rawa makmur belum terpenuhi 100%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah di jelaskan di atas Adapun saran dari peneliti sebagai berikut ini :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebaiknya membuat mekanisme tanggap darurat untuk mencakup prosedur mengenai penanganan darurat, lokasi dan instruksi untuk fasilitas darurat dan prosedur evakuasi.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera mencari solusi bagaimana untuk menindaki penanganan banjir yang tidak merugikan pihak masyarakat.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebaiknya melakukan upaya pencegahan, tanggap darurat dan rekontruksi dan rehabilitasi di kelurahan rawa makmur lebih maksimal lagi.

Penelitian berikutnya tentang penanggulangan bencana banjir di kota Bengkulu masih diperlukan, terutama untuk melakukan pengurangan risiko bencana atau terpadu dari hulu ke hilir untuk mencegah terjadinya bencana, sehingga meminimalkan timbulnya bencana banjir kembali di Kota Bengkulu.

DAFTAR RUJUKAN

- Andhini, N. F. (2017). kajian banjir (bab II). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. http://scholar.unand.ac.id/55790/3/BAB_AKHIR.pdf
- Ari, M. (2019). Verifikasi Data. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Darmi, Titi., & Suwitri, Suwitri. (2017). Strengthening the Capacity of Human Resources Apparatus in the Implementation of New Autonomous Regions. *European Journal of Social Sciences*, 55(4), Pp. 427-438
- Darmi, Titi., & Iprianto. (2013). Budaya Organisasi, Kinerja Organisasi, dan Kinerja Aparatur. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Volume 2, Nomor 1. Pp. 7-11.

- Indarti, S., Suwitri, S., Suharyanto, I., & Kismartini. (2017). The Organization of Community-Based Disaster Risk Reduction for the Earthquake and Tsunami in Bengkulu Province. *Journal of Social Science Studies*, 4(2), 73. <https://doi.org/10.5296/jsss.v4i2.10970>.
- Gunawan, Imam. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. PT Bumi Aksara.
- Hendrik Budiman. 2022. Banjir genangi jalan rawa Makmur kota Bengkulu, warga : tambah parah sejak banyak pembangunan ruko. [https://bengkulu.tribunnews.com/2022/07/06/Banjir-Genangi-Jalan-Rawa-Makmur-Kota-Bengkulu,Warga:Tambah-Parah-Sejak-Banyak-Pembangunan-Ruko-Tribunbengkulu.com](https://bengkulu.tribunnews.com/2022/07/06/Banjir-Genangi-Jalan-Rawa-Makmur-Kota-Bengkulu-Warga-Tambah-Parah-Sejak-Banyak-Pembangunan-Ruko-Tribunbengkulu.com) (tribunnews.com)
- Jiafni risman. 2022. Usai banjir dua hari lalu sampah menumpuk di pintu air tanjung agung kota Bengkulu. <https://bengkulu.tribunnews.com/2022/08/23/Usai-Banjir-Dua-Hari-Lalu,Sampah-Menumpuk-di-Pintu-Air-Tanjung-Agung-Kota-Bengkulu-Tribunbengkulu.com> (tribunnews.com)
- Lexy. J. Moleng. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. (2017). Modul 3 Konsep dan Karakteristik Bencana. *Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Sumber Daya Air Dan Kontruksi*, 3–5.
- Pratama, G. (2017). Analisis Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Bengkulu Skripsi. *UNIB Scholar Repository*, 1–108. <http://repository.unib.ac.id/12189/2/PDF-Skripsi-Gunawan-Pratama.pdf>.
- Redaksi. 2022. Banjir Melanda Sejumlah Wilayah di Indonesia. [https://darilaut.id/berita/Banjir-Melanda-Sejumlah-Wilayah-di-Indonesia](https://darilaut.id/berita/Banjir-Melanda-Sejumlah-Wilayah-di-Indonesia-Dari-Laut) - Dari Laut (diakses tanggal 9 oktober 2022)
- Sutisna, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (2005). PT Kencana.
- Sakti, P., Anwar, F., & Adriadi, R. (2020). Analisis Penerapan Program Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/10.31539/joppa.v2i1.1802>